



Potensi dan Tantangan Perpajakan Sebagai Kunci Mewujudkan **Sustainable Development Goals** **[SDGs]**



Anggraeni Khusnul Khotimah - Tamara Nur Adinda - Rachel Anastasya Lumban Tobing
Ibrahim Naufal - Muhamad Haikal - Rafael Da Costa - Muhammad Farrel Arkan - Shanet Isyana
Ramadhani - Amanda Anindita Putri - Janeth Collin Salvadore - Ivana Melinda - Gisella Andriana
Dzulfan Hidayat - Intan Tresna Kinanti - Maritha Muthi'ah Makmun - Ayu Ria Anjani
Kadek Dwi Ristia Rahmyani - Ni Kadek Nadila Paramesti Sukma - Fransisco Valdino R.
Pradnya Paramita Jasmine - Sandy Permana Arisetiawan Jamarin - Desriany Siang Tappangan
Elsayanti - Lisa Payung - Angela Batara Sapa - Ester Gracella Rubiyanto - Tiara - Muhammad
Riko Hamdani - Lia Novitasari - Ovita Berliana - Mellyana Ulyses Hutabarat - Raissa Arifa Farina
Yohana - Herdianly Br. Nainggolan - Dinda Purwitasari - Shafira Azahra Subekti
Dinda Yusiana Hartati - Alicia Tanaya - Lusya Victolia - Sharene Olivia
Rivmilhyun Junior Hakim - Lelyana Sanda Padang - Chelsea Indri Kurnia

Potensi dan Tantangan Perpajakan Sebagai Kunci Mewujudkan **Sustainable Development Goals** **[SDGs]**

Anggraeni Khusnul Khotimah - Tamara Nur Adinda - Rachel Anastasya Lumban Tobing
Ibrahim Naufal - Muhamad Haikal - Rafael Da Costa - Muhammad Farrel Arkan - Shanet Isyana
Ramadhani - Amanda Anindita Putri - Janeth Collin Salvatore - Ivana Melinda - Gisella Andriana
Dzulfan Hidayat - Intan Tresna Kinanti - Maritha Muthi'ah Makmun - Ayu Ria Anjani
Kadek Dwi Ristia Rahmyani - Ni Kadek Nadila Paramesti Sukma - Fransisco Valdino R.
Pradnya Paramita Jasmine - Sandy Permana Arisetiawan Jamarin - Desriany Siang Tappangan
Elsayanti - Lisa Payung - Angela Batara Sapa - Ester Gracella Rubiyanto - Tiara - Muhammad
Riko Hamdani - Lia Novitasari - Ovita Berliana - Mellyana Ulyses Hutabarat - Raissa Arifa Farina
Yohana - Herdianly Br. Nainggolan - Dinda Purwitasari - Shafira Azahra Subekti
Dinda Yusiana Hartati - Alicia Tanaya - Lusia Victolia - Sharene Olivia
Rivmilhyun Junior Hakim - Lelyana Sanda Padang - Chelsea Indri Kurnia

POTENSI DAN TANTANGAN PERPAJAKAN SEBAGAI KUNCI MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

Tim Penulis:

Anggraeni Khusnul Khotimah, Tamara Nur Adinda, Rachel Anastasya Lumban Tobing, Ibrahim Naufal, Muhammad Haikal, Rafael Da Costa, Muhammad Farrel Arkan, Shanet Isyana Ramadhani, Amanda Anindita Putri, Janeth Collin Salvadore, Ivana Melinda, Gisella Andriana, Dzulfan Hidayat, Intan Tresna Kinanti, Maritha Muthi'ah Makmun, Ayu Ria Anjani, Kadek Dwi Ristia Rahmyani, Ni Kadek Nadila Paramesti Sukma, Fransisco Valdino R, Pradnya Paramita Jasmine, Sandy Permana Arisetiawan Jamarin, Desriany Siang Tappangan, Elsayanti, Lisa Payung, Angela Batara Sapa, Ester Gracella Rubiyanto, Tiara, Muhammad Riko Hamdani, Lia Novitasari, Ovita Berliana, Mellyana Ulyses Hutabarat, Raissa Arifa Farina, Yohana, Herdianly Br. Nainggolan, Dinda Purwitasari, Shafira Azahra Subekti, Dinda Yusiana Hartati, Alicia Tanaya, Lusya Victolia, Sharene Olivia, Rivmilhyun Junior Hakim, Lelyana Sanda Padang, Chelsea Indri Kurnia

Desain Cover:

Usman Taufik

Tata Letak:

Atep Jejen

Editor:

Evi Damayanti

ISBN:

978-623-459-282-5

Cetakan Pertama:

Desember, 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2022

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas

Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telpon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Potensi Dan Tantangan Perpajakan Sebagai Kunci Mewujudkan *Sustainable Development Goals*” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang perpajakan.

Ketika peran pajak kian penting dan ketika nafsu utang semakin besar, serta tuntutan pendanaan pembangunan meningkat, ternyata pemerintah juga kian getol mengeluarkan obligasi negara. Oleh karena itu, beban keuangan terkuras untuk menutup pembiayaan itu. Padahal, potensi pajak masih terbuka di eksplorasi dan di eksploitasi penerimaannya. Ironisnya, di sisi lain kasus perpajakan menjadi anti klimaks dari komitmen Ditjen Pajak untuk mendorong kesadaran dan kepedulian serta tingkat kepatuhan wajib pajak, bukan hanya wajib pajak badan tetapi juga perorangan. Dari fakta ini target perolehan pajak tahun 2019 kian berat untuk direalisasikan, meski di sisi lain tetap harus optimistis bahwa masih ada potensi untuk mencapai target. Oleh karena itu, target perolehan pajak tidak bisa terlepas dari program edukasi. Sukses edukasi secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan juga munculnya kesadaran dari masyarakat terkait urgensi penerimaan pajak. Membangun kesadaran dan kepatuhan wajib pajak juga harus diimbangi dengan profesionalisme dan edukasi kepada wajib pajak agar muncul kesadaran kolektif dari urgensi pajak. *Sustainable development goals* (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah salah satu agenda internasional yang disusun oleh PBB dalam rangka ingin menyejahterakan masyarakat dunia. Tujuan utamanya adalah untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi di negara yang membutuhkan bantuan.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PEMANFAATAN <i>AUTOMATIC EXCHANGE</i>	
<i>OF INFORMATION (AEoI)</i> LEMBAGA PAJAK	1
A. <i>Automatic Exchange Of Information (AEoI)</i>	1
B. Teori Pertukaran Informasi	4
C. Teori Informasi Organisasi	5
D. Potensi <i>Automatic Exchange Of Information</i> Dalam Mengatasi Penghindaran Pajak	5
E. Penutup	8
BAB 2 <i>WEALTH TAX</i> SEBAGAI SARANA PENGURANGAN	
DISPARITAS EKONOMI	11
A. <i>Wealth Tax</i> dan Disparitas	11
B. Definisi Pajak	12
C. Fungsi Pajak	12
D. Pajak Kekayaan (<i>Wealth Tax</i>)	13
E. Definisi Kesejahteraan	13
F. <i>Wealth Tax</i> Sebagai Sarana Pengurangan Disparitas Ekonomi	14
G. Penutup	18
BAB 3 DESAIN PAJAK PENGHASILAN BERBASIS <i>GENDER</i>:	
<i>SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS</i>	21
A. Desain Pajak Penghasilan Perorangan	21
B. Asas Keadilan	23
C. <i>Gender-Responsive Policy</i>	23
D. <i>Gender-Based Taxation</i>	23
E. Pajak Penghasilan	24
F. Status Quo Kebijakan Pajak di Indonesia	24
G. Menurut Jenis Pekerjaan	25
H. Penerapan <i>Gender-Based Taxation</i>	26
I. Desain Pajak Penghasilan Berbasis <i>Gender</i> Untuk Indonesia	27
J. Penutup	29
BAB 4 TRANSFORMASI DIGITAL PERPAJAKAN UNTUK	
MEMULIHKAN PEREKONOMIAN INDONESIA	33
A. Pemulihan Perekonomian Indonesia	33
B. Layanan Online Direktorat Jenderal Pajak (DJP)	34
C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	37

D. <i>Sustainable Development Goals</i>	37
E. Perpajakan Sebagai Pemulihan Perekonomian	37
F. Penutup	41
BAB 5 ARTIFICIAL INTELLIGENCE PADA PROSES SENGKETA PAJAK	45
A. Penyelesaian Proses Sengketa Pajak	45
B. Sengketa Pajak	49
C. <i>Self Assessment System</i>	49
D. Administrasi Pajak	49
E. <i>Cost Of Taxation</i>	49
F. <i>Artificial Intelligence</i>	50
G. <i>Overview</i> Proses Sengketa Pajak	50
H. <i>Artificial Intelligence</i> Dalam Proses Sengketa Pajak	53
I. Peluang dan Tantangan	55
J. Penutup	57
BAB 6 PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI MELALUI IMPLEMENTASI REFORMASI PAJAK	61
A. Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi	61
B. Reformasi Pajak	62
C. Konsep Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi	65
D. Penutup	67
BAB 7 IDENTITAS DALAM PEMBAYARAN PAJAK	69
A. Identitas Dalam Pembayaran Pajak	69
B. Pelayanan Publik	71
C. Pembayaran Pajak	73
D. Penutup	76
BAB 8 CARBON TAX DAN EARMARKING TAX UNTUK MENGURANGI EMISI KARBON	79
A. <i>Carbon Tax</i> dan <i>Earmarking Tax</i>	79
B. <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	81
C. Teori Kebijakan Publik	82
D. <i>Pigouvian Tax</i>	82
E. Pajak Karbon (<i>Carbon Tax</i>)	82
F. <i>Earmarking Tax</i>	83
G. Emisi Karbon Untuk Menciptakan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	83
H. Penutup	88
BAB 9 POTENSI PAJAK DAN TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY	91
A. Potensi Pajak	91
B. Pengertian <i>Cryptocurrency</i>	93
C. Kebijakan Pajak Indonesia Atas Aset Kripto	95

D. Potensi Penerimaan Pajak Transaksi <i>Cryptocurrency</i>	97
E. Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan Pada Transaksi <i>Cryptocurrency</i>	99
F. Factor Penghambat Pemungutan Pajak Pada Transaksi <i>Cryptocurrency</i>	100
G. Penutup	101
BAB 10 POTENSI PENERIMAAN PAJAK (<i>HIGH WEALTH INDIVIDUAL</i>)	105
A. Potensi Penerimaan Pajak	105
B. Konsep Penerimaan Pajak	107
C. Kondisi dan Penerimaan Pajak Hwi	109
D. Potensi Penerapan <i>High Wealth Individual Tax</i>	112
E. <i>High Wealth Individual Tax</i> Pada Peningkatan Pendapatan Pajak	112
F. Penutup	112
BAB 11 LITERASI DIGITAL DAN KEWAJIBAN PELAPORAN PAJAK	117
A. Kewajiban Pelaporan Pajak UMKM	117
B. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	120
C. Literasi Digital	120
D. Kesiapan Pelaporan Pajak	121
E. Kesiapan Literasi Digital Terhadap Kewajiban Pelaporan Pajak	122
F. Konsep Kesiapan Literasi Digital dan Kewajiban Pelaporan Pajak	123
G. Penutup	127
BAB 12 PENGELOLAAN LIMBAH CAIR INDUSTRI UNTUK PELESTARIAN EKOSISTEM LAUT	131
A. Pengelolaan Limbah Cair Industri	131
B. Limbah Cair Industri	132
C. Ekosistem Laut	133
D. Pajak Lingkungan (<i>Green Tax</i>)	133
E. Dampak Negatif Limbah Cair Industri Pada Ekosistem Laut	133
F. Penerapan <i>Green Tax</i> Efektif Dilakukan Untuk Mengendalikan Limbah	135
G. Penerapan <i>Green Tax</i> Untuk Pelestarian Ekosistem Laut	137
H. Penutup	139
BAB 13 KEMAJUAN TEKNOLOGI PADA ERA DIGITAL UNTUK KEPATUHAN PAJAK	141
A. Kemajuan Teknologi Era Digital	141
B. <i>Technology Acceptance Model</i>	142
C. <i>Theory Of Planned Behavior</i>	143
D. <i>Digital Taxation</i>	144
E. Kepatuhan Wajib Pajak	144
F. Kesadaran Wajib Pajak	145

G. Dampak <i>Technology Acceptance Model</i> Pada Kepatuhan Wajib Pajak.....	145
H. Dampak Digital Taxation Pada Kepatuhan Wajib Pajak	146
I. Kemajuan Teknologi Era Digital Pada Kepatuhan Wajib Pajak.....	146
J. Penutup	148
BAB 14 MOMENTUM PRESIDENSI G20 PADA BIDANG PERPAJAKAN INTERNASIONAL UNTUK MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)	153
A. Presidensi G20 Pada Bidang Perpajakan Internasional	153
B. Presidensi G20	154
C. Perpajakan Internasional Dalam G20	155
D. Perusahaan Multinasional	156
E. <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	157
F. Peraturan Perpajakan Internasional Pada Perusahaan Multinasional	157
G. Dampak Penerapan Dua Pilar Perpajakan Internasional.....	159
H. Rekomendasi Momentum Presidensi G20	160
I. Penutup	161
BAB 15 <i>BIG DATA ANALYTICS</i> DALAM ADMINISTRASI PERPAJAKAN.....	167
A. <i>Big Data Analytics</i> Administrasi Perpajakan.....	167
B. Industri 4.0 dan <i>Big Data</i>	169
C. Karakteristik <i>Big Data</i>	170
D. <i>Big Data Analytics</i> di DJP: Informasi Terkini dan Arah Kebijakan.....	171
E. <i>Big Data Analytics</i> : Praktik Pengembangan Tik DJP	172
F. Tantangan Penerapan Implementasi <i>Big Data Analytics</i> Dalam Perpajakan	174
G. Penutup	175



PEMANFAATAN *AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION* (AEOI) LEMBAGA PAJAK

Anggraeni Khusnul Khotimah

Tamara Nur Adinda

Rachel Anastasya Lumban Tobing

A. *AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION* (AEOI)

Indonesia merupakan salah satu anggota forum internasional yang terdiri dari 19 Negara dan 1 Kawasan, yaitu G20. Pada tanggal 31 Oktober 2021, dilaksanakan penyerahan presidensi G20 dari Perdana Menteri Italia, Mario Draghi, kepada Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia, Joko Widodo. Dengan terlaksananya penyerahan tersebut, Indonesia resmi meneruskan presidensi G20 di tahun 2022. Diusungnya tema *Recover Together, Recover Stronger* dalam presidensi G20 ini, untuk mendorong negara di seluruh dunia bersama-sama mendukung pemulihan ekonomi demi mewujudkan tata kelola yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Untuk mendukung hal tersebut, telah ditetapkan beberapa agenda yang akan dibahas melalui presidensi G20. Salah satu agenda yang didorong oleh Indonesia untuk segera diselesaikan melalui G20 adalah mengenai transparansi perpajakan. Isu transparansi perpajakan telah menjadi salah satu permasalahan yang kerap dibahas dalam forum-forum internasional. Hal ini karena, dengan minimnya transparansi perpajakan dapat mengakibatkan terjadinya aliran keuangan gelap yang mampu berimbas kepada penggelapan dan penghindaran pajak. Menurut laporan *The State of Justice 2021*, Indonesia mengalami kehilangan penerimaan pajak sebesar US\$ 2,3 miliar atau setara dengan Rp33,89 triliun akibat dari penggelapan pajak. Sekitar

DAFTAR PUSTAKA

- Alika, R. (2019). Pajak Terima Data Rp 1.300 T Aset Keuangan WNI, Ada Harta Tersembunyi. <https://katadata.co.id/berita/2019/03/14/pajak-terima-data-rp-1300-t-asetkeuangan-wni-ada-harta-tersembunyi>. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2022.
- Anandya, Dudi., Indarini., Margaretha, Silvia. (2011). Pengaruh Pertukaran Informasi (*Information Exchange*) dalam Pembentukan Nilai dan Loyalitas Pengguna Akun Email. Konferensi Nasional Riset Manajemen V
- Anditya, Anugrah. (2018). Pemilihan Konsep Peraturan Perpajakan untuk Menanggulangi Dampak
- Asynchronous Information Dalam Transaksi Elektronik di Indonesia. *Mimbar Hukum*. 30(1): 34-46.
- Byrgrave, Lee A. (2014). *Data Privacy Law An International Perspective*. Oxford: University Press,
- Global Forum on Transparency and Exchange of Information on Tax Purposes*. (2021). *Unleashing*
- The Potential of Automatic Exchange of Information for Developing Countries: 2021 Strategy*. OECD
- Global Forum on Transparency and Exchange of Information on Tax Purposes*. (2018). *The Framework for the Full AEOI Reviews: the Terms of Reference*. OECD
- Idrus, Muhammad Adam Husein Al. (2018). Komunikasi Organisasi CV. Circle Organizer. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Muhadjir, Noeng. (1998). Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin
- Nabila, Dhiya, Amira. (2020). Peran Automatic Exchange of Information (AEOI) Sebagai Rezim Pajak Internasional Dalam Upaya Menghindari Penggelapan Pajak Di Indonesia Menggunakan Konsep Rezim Internasional.
- Natsir, Muhammad. (1999). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sudjarwadi, D. (2017). Sosialisasi Akses Informasi Keuangan Bagi Perpajakan. Semarang. *Sustainable Development Goals Indonesia*. <https://www.sdg2030indonesia.org/>. Diakses pada 15 Agustus 2022.
- Thibaut, John Walter., & Kelley, Harold. (1959). *The Social Psychology of Groups*. John Wiley.
- Weick, Karl Edward. (1969). *The Social Psychology of Organizing*. McGraw Hill.

Wijayanti, Nadia Kusuma. (2013) Analisis Proses Informasi Organisasional dengan Pendekatan Karl Weick tentang Perkembangan Indonesia Wifi di Divisi *Wireless Broadband* Area Yogyakarta. Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.



WEALTH TAX SEBAGAI SARANA PENGURANGAN DISPARITAS EKONOMI

Ibrahim Naufal
Muhamad Haikal
Rafael Da Costa
ibrahimnaufal.edu@gmail.com

A. WEALTH TAX DAN DISPARITAS

Dengan melihat situasi saat ini, skema pajak progresif di Indonesia yang berdasarkan pada pendapatan per tahun dinilai belum maksimal untuk mengurangi disparitas ekonomi, terlihat dari sumbangsih pajak orang-orang yang memiliki penghasilan diatas 5 miliar hanya sekitar 0,03 persen (CNN, 2021) dan hal ini juga ditandai oleh Indeks Gini di indonesia yang terus meningkat, yang mengindikasikan dengan sistem dan keadaan yang sekarang, disparitas ekonomi di Indonesia terus memburuk yang menandakan sistem yang sekarang tidak menuju pada perbaikan kesejahteraan.

Pengurangan ketimpangan di sini merupakan fokus utama dari penerapan wealth tax yang mendukung poin nomor 10 dari *Sustainable Development Goals* (SDGs). Disparitas Ekonomi ataupun kesenjangan adalah suatu variabel yang berdampak negatif terhadap perekonomian suatu negara. Negara yang memiliki ketimpangan yang besar cenderung akan memiliki pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang lebih rendah, tingkat kriminalitas yang tinggi, dan juga rata-rata pendidikan yang rendah. Dengan begitu, pada paper kali ini penulis bertujuan untuk mengusulkan reformasi pajak berbasis kekayaan (*wealth tax*), sebagai upaya pengurangan kesenjangan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Advani, A., Chamberlain, E. and Summers, A., 2020. *A Wealth Tax for the UK. Wealth Tax Commission Final Report*.
- Brown, R.D., 1991. *A primer on the implementation of wealth taxes*. Canadian public policy/analyse de Politiques, pp.335-350.
- CNN Indonesia. 2021. Jumlah Orang Kaya Indonesia Meningkat di Tengah Corona. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210713133320-92-667012/jumlah-orang-kaya-indonesia-meningkat-di-tengah-corona>. 19 Agustus 2022.
- Dari, K. W. 2019. Pengetahuan Umum Perpajakan. <https://www.pajakku.com/read/5dae9cb04c6a88754c088066/Pengetahuan-Umum-Perpajakan>. 18 Agustus 2022.
- Divito, E., 2022. Why the US Needs a Wealth Tax - Roosevelt Institute. [online] *RooseveltInstitute*. Available <<https://rooseveltinstitute.org/2021/02/11/why-the-us-needs-a-wealth-tax/>> [Accessed 21 August 2022].
- Jayani, D. H. 2021. Pandemi Menyuburkan Orang Kaya Indonesia. <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/60f7844937f9e/pandemi-menyuburkan-orang-kaya-indonesia>. 19 Agustus 2022.
- Johnsen, D. and Dellinger, W., 2018. *The Constitutionality of a National Wealth Tax*. Ind. LJ, 93, p.111.
- Kingdom—History, *Present Structure and Future Possibilities*. Routledge.
- Pajakbro.com. 2017. Pengertian Pajak Menurut Para Ahli Berdasarkan Undang-Undang. <https://www.pajakbro.com/2017/06/pengertian-pajak.html>. 18 Agustus 2022.
- Sandford, C.T., 2018. *Taxing Personal Wealth: An Analysis of Capital Taxation in the United*
- Sandra. 2021. Mengenal Fungsi Pajak di Indonesia. <https://www.pajakku.com/read/60d2be0558d6727b1651ac01/Mengenal-Fungsi-Pajak-di-Indonesia>. 18 Agustus 2022.
- Scott, M. P. 2022. *Wealth Tax*. <https://www.investopedia.com/terms/w/wealth-tax.asp>. 18 Agustus 2022.
- Vox. 2019. *A Better Way to Tax The Rich*. https://www.youtube.com/watch?v=pTwPHuE_HrU. 19 Agustus 2022
- Warren, E. 2021. *How a Wealth Tax Works: Explained by Elizabeth Warren*. <https://www.youtube.com/watch?v=ReQkzPiYJdE>. 19 Agustus 2022.

Wikipedia. 2019. Kesejahteraan. <https://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan>.
18 Agustus 2022.



DESAIN PAJAK PENGHASILAN BERBASIS *GENDER*: *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*

Muhammad Farrel Arkan
Shanet Isyana Ramadhani
Amanda Anindita Putri
muhammad.farrel03@ui.ac.id

A. DESAIN PAJAK PENGHASILAN PERORANGAN

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan rencana aksi global yang disepakati oleh 193 pemimpin dunia, termasuk Indonesia untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan (UNDP, 2022). Terdapat 17 tujuan dan 169 target dalam SDGs yang diharapkan dapat menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih baik. Para pelopor menilai bahwa tindakan di satu bidang akan mempengaruhi hasil di bidang lain karena saling terintegrasi (UNDP, 2022). Salah satu target dalam SDGs yang sedang digencarkan adalah peningkatan kesetaraan gender. UNDP (2017) menyatakan bahwa kesetaraan gender bukan berarti pria dan wanita harus sama. Namun, merujuk pada suatu keadaan yang setara antara gender dalam pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing. Target yang ingin dicapai dari SDG kelima ini adalah mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum wanita di semua sektor. Kesetaraan gender lebih dari sekedar masalah moralitas, tetapi juga masalah ekonomi yang vital (IMF, 2017).

DAFTAR PUSTAKA

- Alesina, Alberto, Ichino, A. & Karabarbounis, K. 2011. *Gender-Based Taxation and the Division of Family Chores*. *American Economic Journal: Economic Policy*. 3(2): 1-40.
- Bintoro, G.E., 2021. *Economic Growth and Gender Wage Gap, Case in ASEAN 6 Members Countries*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2).
- Capraro, C., 2014. Taxing Men and Women: Why Gender is Crucial for a Fair Tax System. *ristian AID. ORG*.
- Coelho, M., Davis, A., Klemm, A. & Buitron, C. O. 2022. *Gendered Taxes: The Interaction of Tax Policy with Gender Equality*. *IMF Working Paper*. 22(26): 22-36.
- Grown, C., 2005. *What Gender Equality Advocates Should Know about Taxation*. *Paper for the Gender Equality and Economy Program Levy Economics Institute Bard College September, 28*, p.2005.
- Gunnarsson, A., 2021. *Gender Equality and Taxation-International Perspectives*. Available at SSRN 3818771.
- Hariani, A., 2022. Kesetaraan Gender Jadi Pertimbangan. [Online] Dapat diakses: <https://majalahpajak.net/kesetaraan-gender-jadi-pertimbangan/>. [Diakses 19 Agustus 2022].
- IRS. 2022. *Child and Dependent Care Credit FAQs*. [Online]. Dapat diakses: <https://www.irs.gov/newsroom/child-and-dependent-care-credit-faqs>. [Diakses 21 Agustus 2022]
- Jaumotte, F., 2003. *Female Labour Force Participation: Past Trends and Main Determinants in OECD countries*.
- Joshi, A., Kangave, J. and van den Boogaard, V., 2020. *Gender and Tax Policies in the Global South*.
- Kadir, K. and Weni Lidya, S., 2019. *Returns to Education and Wages Distribution in Indonesia: A Comparison across Gender Groups*. *Labor Market*. In *E3S Web of conferences* (Vol. 73, p. 11019). *EDP Sciences*.
- LaLumia, S. 2008. *The Effects of Joint Taxation of Married Couples on Labor Supply and Non- Wage Income*. *Journal of Public Economics*. 92(7): 1698-1719.
- OECD. 2022. *Tax Policy and Gender Equality: A Stocktake of Country Approaches*. *OECD Publishing*. Paris.
- Rahman, D. F. 2022. Upah Laki-laki Lebih Tinggi 43% dari Perempuan dalam Usaha Jasa. [Online] Dapat diakses: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/11/upah-laki-laki>

- lebih-tinggi-43-dari-perempuan-dalam-usaha-jasa. [Diakses 19 Agustus 2022].
- Ramsey, F. P. 1927, *A Contribution to the Theory of Taxation*. *Economic Journal*. 37(145):47–61.
- Rosdiana, H. & Irianto, E. S., 2012. Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia. 1 ed. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rubin, C., 2020. *The Gender Wage Gap in Indonesia*. *Georgetown University Website*
- Saptono, P. B. & Khozen, I. 2022. *Gender-conscious tax policy to promote equality*. [Online] Dapat diakses: <https://www.thejakartapost.com/opinion/2022/03/14/gender-conscious-tax-policy-to-promote-equality.html>. [Diakses 19 Agustus 2022].
- Stotsky, J. G. 1996. *Gender Bias in Tax System*. *IMF Working Paper*. 99(96): 25-33.
- Stotsky, J. G. 2017. *Tax Proposals: A Missed Opportunity for Addressing Implicit Gender Bias*. [Online] Dapat diakses: <https://genderpolicyreport.umn.edu/tax-proposals-a-missed-opportunity-for-addressing-implicit-gender-bias/#:~:text=Implicit%20gender%20biases%20are%20a,and%20can%20enforce%20gender%20bias>. [Diakses 19 Agustus 2022].
- Suandy, E., 2016. Hukum Pajak. 7 ed. Jakarta: Salemba Empat. Artikel Jurnal
- Sugiharti, R.R. and Kurnia, A.S., 2018. *Gender Wage Gap and Education: Case in Indonesia's*
- Suharyono, S. and Digdowiseiso, K., 2021. *Retracted: Education and Gender Wage Gap: Evidence from Indonesia*. *Accounting*, 7(1), pp.33-40.
- Sukma, W.L. and Kadir, K., 2019. *Decomposition of the Gender Wage Gap in Indonesia: Analysis from Sakernas data*. *Munich Personal RePEc Archive*, 94930.
- UNDP, 2022. *What are the Sustainable Development Goals?*. [Online] Dapat diakses: [https://www.undp.org/sustainable-development-goals#:~:text=The%20Sustainable%20Development%20Goals%20\(SDGs\)%2C%20al](https://www.undp.org/sustainable-development-goals#:~:text=The%20Sustainable%20Development%20Goals%20(SDGs)%2C%20al) so%20known%20as%20the,people%20enjoy%20peace%20and%20prosperity. [Diakses 19 Agustus 2022]
- UNDP. 2017. *Change Makers: Programming for Gender Equality and Helping Men and Women in Indonesia Shape A Fairer World*. [Online] Dapat diakses: <https://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/gender-equality.html>. [Diakses 19 Agustus 2022].

Vijayarasa, R. 2021. *What is Gender-Responsive Legislation? Using International Law to Establish Benchmarks for Labour, Reproductive Health and Tax Laws that Work for Women*. *Griffith Law Review*, 29(3): 344-350.

Women, U.N., 2016. *Gender Equality and Taxation in Vietnam: Issues and Recommendations*. Tesis



TRANSFORMASI DIGITAL PERPAJAKAN UNTUK MEMULIHKAN PEREKONOMIAN INDONESIA

Janeth Collin Salvadore
Ivana Melinda
Gisella Andriana
janethsalvadore88@gmail.com

A. PEMULIHAN PEREKONOMIAN INDONESIA

Di era digitalisasi, perkembangan teknologi memiliki peran yang penting bagi berbagai bidang, salah satunya bidang perpajakan. Sistem perpajakan di Indonesia pada dasarnya menganut sistem *self assessment*, yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Pada saat ini, seiring dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi, Wajib Pajak dapat melakukan kewajiban administrasi perpajakannya secara online melalui website yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pelayanan perpajakan secara online yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak antara lain *e-Registration*, *e-Filing*, *e-Form*, *e-Billing*, *e-Faktur*, dan *e-Objection*.

Dengan adanya digitalisasi dalam bidang perpajakan, wajib pajak dapat lebih efisien dan efektif dalam melaporkan dan menyetorkan pajaknya. Hal ini berdampak pada meningkatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara khususnya dalam penerimaan pajak. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara digunakan oleh negara untuk merealisasikan tujuan dari Sustainable Development Goals yang sedang digencarkan oleh pemerintah. Hal ini

DAFTAR PUSTAKA

- Arlitayani, N.K.M. 2020. Ini Manfaat e-Bupot PPh Pasal 23/26, Tunggu Apa Lagi?. <https://pajak.go.id/id/artikel/ini-manfaat-e-bupot-pph-pasal-2326-tunggu-apa-lagi>. 18 Juli 2022.
- DPR. 2021. Kamus-1. <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-1.pdf>. 6 Agustus 2022.
- perintah_ri_no_45_tahun_2013_tentang_tata_cara_pelaksanaan_apbn.pdf. 6 Agustus 2022.
- Fitriya. 2022. Panduan Cara Membuat Kode Billing Pajak Online di Klikpajak. H <https://klikpajak.id/blog/cara-membuat-kode-billing-untuk-bayar-pajak-online-bisa-di-klikpajak/>. 17 Juli 2022.
- Goals, SD. 2022. *Sustainable Development Goals*. <https://www.sdg2030indonesia.org/#modallconDefinition>. 18 Juli 2022.
- Mardlo, ZA. 2020. E-Filing dan E-Form, Apa Bedanya?. <https://pajak.go.id/id/artikel/e-filing-dan-e-form-apa-bedanya>. 17 Juli 2022.
- Mattalatta, A. 2007. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/28tahun2007uu.htm#:~:text=Dalam%20Undang%20Undang%20ini%20yang,bagi%20sebesar%20besarnya%20kemakmuran%20rakyat.16> Juli 2022.
- Pajak, DJ. 2017. Siapkan EFIN sebelum lapor SPT Online. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/siapkan-efin-sebelum-lapor-spt-online>. 15 Juli 2022.
- Pajak, Online. 2017. Apa itu e-Nofa? Bagaimana Cara Mendapatkannya? Cek Disini!. <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/permintaan-nomor-seri-faktur-pajak-pada-e-nofa-online-2>. 18 Juli 2022.
- PPID. 2020. Bayar Pajak Gak Perlu Ribet Lagi, Pakai e-billing Aja! <https://ppid.semarangkota.go.id/prosedur-mendapatkan-e-billing-perpajakan/>. 17 Juli 2022.
- RI, DPR. 2021. LIVE STREAMING - KOMISI XI DPR RI RAKER MENKEU DAN MENKUMHAM. <https://www.youtube.com/watch?v=cz9fArbc9RM>. 19 Juli 2022.
- RI, Setjen. 2013. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

https://setjen.pu.go.id/birokeuangan/pdf/Peraturan/PELAKSANAAN_APBN/peraturan_pem

Setiawan, KH. 2020. Penerapan Aplikasi Elektronik Faktur Pajak (e-Faktur).[https://www.pajakku.com/read/5ec4ab3a53688d5a1e011787/Penerapan-Aplikasi-Elektronik-Faktur-Pajak-\(e-Faktur\)](https://www.pajakku.com/read/5ec4ab3a53688d5a1e011787/Penerapan-Aplikasi-Elektronik-Faktur-Pajak-(e-Faktur)). 19 Juli 2022.



ARTIFICIAL INTELLIGENCE PADA PROSES SENGKETA PAJAK

Dzulfan Hidayat

Intan Tresna Kinanti

Maritha Muthi'ah Makmun

Intan.tresna@ui.ac.id

A. PENYELESAIAN PROSES SENGKETA PAJAK

Sebagai salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki dua unsur utama di dalamnya, yaitu penerimaan (*revenue*) dan pengeluaran (*expenditure*) (Kemenkeu RI, 2021). Diperlukan pendanaan yang besar guna pembangunan negara yang tidak dapat diserahkan kepada pasar. Oleh sebab itu, pemerintah harus mencari sumber keuangan untuk memproduksi dan menyediakan kebutuhan publik tersebut, yang salah satunya adalah melalui pajak (Gunawan, 2020).

DAFTAR PUSTAKA

- American *Journal of Industrial and Business Management*, 8, 1817–1824. <https://doi.org/10.4236/ajibm.2018.88123>
- Anggraeni, D. (2018). DJP Tingkatkan Layanan Berbasis Teknologi. <https://www.pajak.go.id/artikel/djp-tingkatkan-layanan-berbasis-teknologi>
- Aritonang, J. (2020). Analisis Penyebab Kekalahan DJP pada Sengketa Pajak Sehubungan dengan Penetapan Secara Jabatan. In Simposium Nasional Keuangan Negara 2020 (pp.953–973).
- Asmorowati, M. (2011). Sengketa Keberatan Dibandingkan Dengan Sengketa Pengadilan
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan RI. Mardiasmo. (2019). Pengantar Perpajakan. Penerbit ANDI Yogyakarta.
- Bawazier, F. (2011). Reformasi Pajak di Indonesia *Tax Reform in Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia, 8(1), 1–28.
- Bentley, D. (2021). *Tax Officer 2030: The Exercise of Discretion and Artificial Intelligence*. November.
- Biyan, Ö., & Yılmaz, G. (2019). *Artificial Intelligence: If It's Taxed, But How? In Critical debates in public finance*. Peter Lang.
- BPS. (2022). Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2020-2022. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Chhaya, K., Khanzode, A., & Sarode, R. D. (2020). *Advantages and Disadvantages of Artificial*
- China Court. (2018). *People's Court News, 'Move your fingers to a lawsuit.'* <https://www.chinacourt.org/article/detail/2018/08/id/3471944.shtml>
- China Court. (2020). *Supreme People's Court, 'The status of judicial protection of intellectual property in Chinese courts.'* <https://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-228161.html>
- CIAT. (2020). *Could Artificial Intelligence help resolve disputes with Tax Administrations?*
- CNN Indonesia. (2021). Kontribusi Pajak ke Negara Naik Jadi 65 Persen dalam 20 Tahun. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210913192407-532-693705/kontribusi-pajak-ke-negara-naik-jadi-65-persen-dalam-20-tahun>

- Corvalán, J. G. (2020). *Prometea: Artificial Intelligence To Transform Justice and Public Organizations. International Journal of Digital and Data Law*, 6, 89–101. <http://ojs.imodev.org/index.php/RIDDN>
- DJP. (2020). Tax Dispute Resolution. <https://pajak.go.id/index.php/en/tax-dispute-resolution>
- Fauzan, I. (2020). *Artificial Intelligence (AI) Pada Proses Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian - Sebuah Eksplorasi Konsep Setelah Masa Pandemi Berakhir. Jurnal Civil Service*, 14(1), 31–42.
- Feng, D. (2017). AI+ Tax” Will Become the “Black Technology” of the Tax System. <https://www.shui5.cn/article/ef/113244.html>
- G20. (2022). *PRIORITY ISSUES G20 INDONESIA: DIGITAL TRANSFORMATION*. <https://g20.org/g20-presidency-of-indonesia/#recover>
- Gunadi, D. (2005). *Administrasi Pajak*. Lembaga Pengkajian Publik dan Akuntansi pemerintah
- Gunawan, I. (2020). Mengapa Perekonomian Tidak Bisa Sepenuhnya Diserahkan Kepada Pasar atau Pihak Swasta? https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1138-1332/umum/orang-juga-bertanya/mengapa-perekonomian-tidak-bisa-sepenuhnya-diserahkan-kepada-pasar-atau-pihak-swasta&as_qdr=y15
- Huang, Z. (2018). *Discussion on the Development of Artificial Intelligence in Taxation. Intelligence and Machine Learning: A Literate Review. International Journal of Library& Information Science (IJLIS)*, 9(1), 3.
- International Journal for Court Administration*, 12(1), 1–26. <https://doi.org/10.36745/ijca.367Website>
- SSAS. (2022). *SENGKETA PAJAK, Kinerja Pengawasan Dipertanyakan*.
- Kayid, A. (2020). *The role of Artificial Intelligence in future technology*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12799.23201>
- Kemenkeu RI. (2021). *APBN KITA: Edisi Mei 2021*. <https://web.kemenkeu.go.id/media/17876/apbn-kita-mei-2021.pdf>
- Kemenkominfo. (2018). *Big Data, Kecerdasan Buatan, Blockchain, dan Teknologi Finansial di Indonesia*. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi Dan Informatika, 1–66.
- McCarthy, J. (1979). *ASCRIBING MENTAL QUALITIES TO MACHINES*. <http://www-formal.stanford.edu/jmc/ascribing.pdf>
- O’Neill, N., & Chang, L. (2017). *POLICY BENCHMARKING A GUIDE TO BEST PRACTICES*. Cambridge Associates LLC. <https://www.cambridgeassociates.com/wp->

content/uploads/2018/04/Policy-Benchmarking-A-Guide-to-Best-Practices-1.pdf

- Pajak Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku. Jurnal Wawasan Yuridika, 25(2), 369–380. Ast, F. (2020). Prometea, Artificial Intelligence in the Judicial System of Argentina. <https://medium.com/astec/prometea-artificial-intelligence-in-the-judicial-system-of-argentina-4dfbde079c40>
- Porporatto, P. (2020). *Artificial Intelligence help resolve disputes with Tax Administrations?* <https://www.gccfintax.com/articles/could-artificial-intelligence-help-resolve-disputes-with-tax-administrations--1684.asp>
- Rasmini, M., & Ismail, T. (2014). Pengertian Pajak, Administrasi Pajak, Fungsi, dan Syarat Pemungutan Pajak. In Administrasi Perpajakan. Universitas Terbuka.
- Rincon-Flores, E. G., Lopez-Camacho, E., Mena, J., & Lopez, O. O. (2020). *Predicting academic performance with Artificial Intelligence (AI), a new tool for teachers and students. IEEE Global Engineering Education Conference, EDUCON, 2020- April (November), 1049–1054.* <https://doi.org/10.1109/EDUCON45650.2020.9125141>
- Rosdiana, H. (2020). Asas-Asas Pemungutan Pajak dan Alternatif Dasar Pengenaan Pajak (Tax Base).
- Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2012). Pengantar Ilmu Pajak. PT Raja Grafindo Persada. Jurnal
- Sandford, C. T. (1995). *Tax compliance costs: measurement and policy. Fiscal Publications in association with the Institute for Fiscal Studies.*
- Sekretariat Pengadilan pajak. (2021). Penyelesaian Sengketa Pajak Tahun 2015-2021. <http://www.setpp.kemenkeu.go.id/statistik>
- Shi, C., Sourdin, T., & Li, B. (2021). *The Smart Court – A New Pathway to Justice in China?*



PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI MELALUI IMPLEMENTASI REFORMASI PAJAK

Ayu Ria Anjani

Kadek Dwi Ristia Rahmyani

Ni Kadek Nadila Paramesti Sukma

ayuriaanjani@gmail.com

A. PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI

Reformasi Pajak merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan pembangunan dalam suatu negara, sesuai dengan keadaan saat ini adanya pandemi Covid-19 mengharuskan pemerintah untuk melakukan perubahan dalam segala aspek. Oleh karena itu setiap negara ingin pemerintahannya tetap berjalan dan berkembang di tengah pandemi ini. Seperti halnya Reformasi pajak yang melahirkan Undang - Undang Harmonisasi Perpajakan yang diciptakan dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Hal ini sesuai dengan aksi yang dilakukan oleh PBB untuk membentuk SDGs (*Sustainable Development Goals*) pada 25 September 2015 dengan tujuan untuk pembangunan demi menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kebijakan Fiskal. 2021. Reformasi Perpajakan untuk Penciptaan Keadilan, Peningkatan Direktorat Jendral Pajak, Reformasi Perpajakan. <https://www.pajak.go.id/index.php/id/reformasi-perpajakan>. 16 Agustus 2022
- Heri Firdaus Ahmd, Listiyanto Eko, Abra P.G, Taufikurahman M. Rizal.2020. Kajian Tengah Tahun INDEF 2020: Menata Arsitektur Ekonomi Pasca Pandemi. INDF
- Hofir Abd, Wisnu Mahendra D, Ratih Mutiarasari Dwi, Rohmani Edmalia.2021. Cerita di Balik
- Kementerian PPN/Bapnes, Tujuan 8. <https://www.sdg2030indonesia.org/page/16-tujuan>-delapan. 15 Agustus 2022
- Kepatuhan, dan Penguatan Fiskal. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/326>. 10 Agustus 2022
- Kurnia Hermawan A, Rheza Ramadhan Muh. 2020. Simposium Nasional Keuangan Negara. Pengaruh Perubahan Tarif PPh UMKM Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak di KPP Pratama Boyolali. Hal 43 dari 1115
- Rania Sobir Ms. Micro-, *Small and Medium-sized Enterprises (MSMEs) and their role in achieving the Sustainable Development Goals*. *Departement of Economic and Social Affairs*.
- Reformasi Perpajakan. Edisi I, Direktorat Jendral Pajak, Kementrian Keuangan RI. Jakarta
- Suyanto S. 2022. OPINI, Mencermati Reformasi Perpajakan. <https://www.ssas.co.id/opini-mencermati-reformasi-perpajakan/>. 13 Agustus 2022
- Kementrian PPN/Bapenas, 1. Tanpa Kemiskinan. <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-1/> . 15 Agustus 2022



IDENTITAS DALAM PEMBAYARAN PAJAK

Devie Anggraini Tressia
Raden Mikael Rizki Kusumadewa
Jerry Pranata Mulya
devianggrainitresia@gmail.com

A. IDENTITAS DALAM PEMBAYARAN PAJAK

Indonesia menjadi Presidensi Group of Twenty (G20) secara setahun penuh dimana dalam artian Indonesia menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan perhelatan yang dimulai dari 1 Desember 2021 hingga KTT G20 di November 2022. Presidensi G20 mengusung tema “*Recover Together, Recover Stronger*” yang mana artinya Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu membahu dalam pemulihan dan serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Acara dalam rangkaian tema tersebut dapat terlihat dari agenda prioritas jalur keuangan dalam Presidensi G20 Indonesia tahun 2022, antara lain:

1. *Exit Strategy to Support Recovery* atau strategi keluaran untuk mendukung pemulihan. b. *Addressing Scarring Effect to Secure Future Growth* atau pemetaan dampak berkepanjangan untuk melindungi pertumbuhan kedepannya.
2. *Payment System in Digital Era* atau sistem pembayaran di era digital dengan mengandalkan berbagai kemajuan teknologi.
3. *Sustainable Finance* atau keuangan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Kurniawan. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Penerbit Pembaharuan.
- Agus Dwiyanto. 2005. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arifin, Syamsul Bahri. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Belawan. Medan: STIE Harapan Medan.
- Bappenas, K.P., 2020. Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan IV 2019.
- Cooper, A.F., 2010. The G20 As an Improvised Crisis Committee and/or a Contested 'Steering Committee' For the World. *International Affairs*, 86(3), pp.741-757.
- Dalam, W.W.W. and Novriyanti, I., 2020. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), pp.24-35.
- Denhardt, J.V. dan Denhardt, R.B. 2003. *The New Public Service*. New York: M.E. Sharpe.
- Mahsyar, A., 2011. Masalah pelayanan publik di Indonesia dalam perspektif administrasi publik. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2).
- Menteri Keuangan. 2022. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Jakarta.
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Jakarta.
- Moh. Nazir. (1998). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta.
- Wakhid, A.A., 2017. Reformasi Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal TAPIs*, 14(1), pp.1-10.
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.



CARBON TAX DAN EARMARKING TAX **UNTUK MENGURANGI EMISI KARBON**

Fransisco Valdino R.
Pradnya Paramita Jasmine
Sandy Permana Arisetiawan Jamarin
Email: fransiscovaldino19@gmail.com

A. *CARBON TAX DAN EARMARKING TAX*

Saat ini dunia sedang mengalami kondisi iklim yang begitu buruk. Hal ini ditandai dengan begitu banyaknya isu kerusakan lingkungan yang sering diperdebatkan baik secara nasional maupun internasional. Hal ini pun mendorong untuk dirumuskannya suatu kebijakan yang dapat menekan tingkat perubahan iklim bumi yang kebanyakan berasal dari emisi gas rumah kaca (GRK). Salah satu upaya dalam menekan tingkat perubahan iklim ialah dengan disepakatinya dokumen *"The Future We Want"* dalam *UN Conference on Sustainable Development* 2012. Hal ini menjadi pendorong utama penyusunan agenda pembangunan pasca 2015 yang disepakati dalam Sidang Umum PBB pada September 2015, yaitu Agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Isu kerusakan lingkungan pun tidak mungkin diabaikan, hasil riset dari Standard and Poor's (2014) mengemukakan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan rentan akan resiko perubahan iklim. Berbagai permasalahan iklim yang dapat dirasakan hari ini seperti kelangkaan air, kerusakan ekosistem lahan, kerusakan ekosistem lautan, penurunan kualitas kesehatan, kelangkaan pangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhiroh, T., & Kiswanto, K. (2016). *The determinant of carbon emission disclosures. Accounting Analysis Journal*, 5(4), 326-336.
- Amadeo, K. 2022. *Pigouvian Taxes, Their Pros and Cons and Examples*. <https://www.thebalance.com/pigouvian-tax-definition-and-examples-4157479>. Diakses pada 19 Agustus 2022.
- Anggara, Sahya. 2018. Kebijakan Publik. Pustaka Setia. Bandung
- Bavbek, G. 2016. *Carbon Taxation Policy Case Studies. Carbon Taxation Policy Case Studies- Edam*. Diakses pada 20 Agustus 2022.
- Carl, J., & Fedor, D. (2016). *Tracking global carbon revenues: A survey of carbon taxes versus cap-and-trade in the real world. Energy Policy*, 96, 50-77.
- Corporate Governance* terhadap Pengungkapan Emisi Karbon. UM Magelang Conference Series. 642-657.
- Ekonomi Di Lima Belas Negara Selama 27 Tahun. JMB: Jurnal Manajemen dan Bisnis, 7(2). (Prosiding Seminar/Konferensi)
- Fullerton, D., Leicester, A., & Smith, S. (2008). *Environmental taxes. National bureau of economic research*.
- Gokhale, H. (2021). *Japan's carbon tax policy: Limitations and policy suggestions. Current Research in Environmental Sustainability*, 3, 100082.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2005. Hukum Tata Lingkungan. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2021. Presiden Jokowi Sampaikan Komitmen Indonesia dalam Penanganan Perubahan Iklim di COP26. <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-sampaikan-komitmen-indonesia-dalam-penanganan-perubahan-iklim-di-cop26/>. Diakses pada 19 Agustus 2022.
- Jackson, J. (2013). *Tax earmarking, party politics and gubernatorial veto: theory and evidence from US states. Public Choice*, 155(1), 1-18.
- Jati, Geny. 2021. Cop26: Pertunjukan "Sepi" dari Jokowi. <https://iesr.or.id/cop26-pertunjukan-sepi-dari-jokowi>. Diakses pada 19 Agustus 2022.
- Khastar, M., Aslani, A., & Nejati, M. (2020). *How does carbon tax affect Carbon Tax social welfare and emission redu Carbon Taxion in Finland?. Energy Reports*, 6, 736-744.
- Knowledge Centre* Perubahan Iklim. Komitmen Indonesia dalam Pengendalian Perubahan Iklim.

<http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/tentang/amanat>

perubahan- iklim/komitmen-indonesia#:~:text=Komitmen%20dan%20Kontribusi%20Indonesia%20ke mbali,kaca%20dan%20bergera%20aktif%20mencegah. Diakses pada 19 Agustus 2022.

Kumala, R., Ulpa, R., & Rahayu, A. (2021). Pajak Karbon: Perbaiki Ekonomi dan Solusi

Lindungi Bumi. Prosiding Seminar STIAMI. Februari 2021, Jakarta, Indonesia. 66-73. (Website)

Lolo, L. D. F. A., Maulana, A. D., & Pasaribu, D. N. (2022). Transparansi Pajak Karbon: Digitalisasi Pajak Karbon Sebagai Katalisator Dalam Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia. *Jurist-Di Carbon Taxion*, 5(1), 205-228.

Purwanti, T., Setyawanti, D., & Jati, A. N. (2013). Desain Standar Akuntansi Karbon dan Model Integrasi Pelaporan Emisi Karbon dalam Laporan Keuangan. *Kiat Bisnis*, 5(3). Puspita, D. A. (2015). Carbon Accounting: Apa, Mengapa, dan Sudahkah Ber-implikasi pada

Rosen, H. S. (2001). *Public Finance. Sixth Edition. McGraw-Hill/Irwin. New York*. (Artikel Jurnal)

Saputra, W. K. 2021. Pajak Karbon dan Pigouvian Tax. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pajak-karbon-dan-pigouvian-tax>. Diakses pada 19 Agustus 2022.

Sari, K.P., Susanto Barkah. 2021. Green Strategy, Corporate Social Responsibility Disclosure, Good

Selvi, S., Rahmi, N., & Rachmatulloh, I. (2020). Urgensi Penerapan Pajak Karbon Di Indonesia. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 7(1), 29-34.

Sitorus, R. R., & Pratysto, T. (2018). Pajak Karbon, Kerusakan Karbon, Dan Pertumbuhan

Sustainability Reporting? (Based On 2012 th'PROPER With Gold Rank). *Jibeka*, 9(1), 29-36.



POTENSI PAJAK DAN TRANSAKSI *CRYPTOCURRENCY*

Desriany Siang Tappangan
Elsayanti
Lisa Payung
desriany.tappangan07@gmail.com

A. POTENSI PAJAK

Seiring dengan perkembangan zaman dan peradaban saat ini membuat seluruh aspek kehidupan kini perlahan berbasis pada teknologi. Salah satu perubahan signifikan yang dapat kita rasakan adalah adanya kegiatan ekonomi berbasis elektronik seperti *E-commerce* serta perdagangan yang menggunakan sistem elektronik. Tidak berhenti sampai disitu hal ini berdampak pula pada perubahan sistem pembayaran yang pada mulanya rata-rata transaksi ekonomi menggunakan *cash based instrument* (alat pembayaran tunai) kini telah berkembang menjadi non cash instrument (alat pembayaran non tunai), hal ini ditandai dengan munculnya uang dalam bentuk virtual. Sistem pembayaran virtual inilah yang dikenal dengan sebutan *Cryptocurrency*. *Cryptocurrency* di Indonesia telah diatur dalam pasal 1 angka 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka. Pada dasarnya Aset Kripto merupakan suatu komoditi digital aset yang menggunakan kriptografi yang terhubung dengan jaringan peer-to-peer serta buku besar yang telah terdistribusi, dengan tujuan mengatur terciptanya unit baru, serta memroses

DAFTAR PUSTAKA

- Akira Ariyoshi, et.al. (2000). *"Capital Controls: Country Experiences with Their Use and Liberalization"*. IMF Occasional Paper: Mei 2000.
- BKPM. (2016). *Domestic And Foreign Direct Investment Realization In Quarter III and January–September 2015*. Jakarta: BKPM.
- Brahmi, M. S., & Darmadha, I. N. (2018). Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6(12), 1–15. <https://ocs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/44085>
- Djufri, M. (2018). Sumber: Bank Indonesia Sumber: Bank Indonesia. 1, 23–40.
- Dwicaksana, H., & Pujiyono. (2020). Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia. *Jurnal Privat Law*, 8(2), 187. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48407>
- Farida, Y., & Khasanah, Z. S. U. (2021). Analisis Performa Mata Uang Virtual (*Cryptocurrency*) Menggunakan *Preference Ranking Organization Method For Enrichment Evaluation (Promethee)*. *Rekayasa*, 14(1), 1–9. <https://doi.org/10.21107/rekayasa.v14i1.8793>
- Gunawan. (2012). Analisis Interaksi Capital Flows, Fluktuasi Nilai Tukar, Dan Kebijakan Moneter Di Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Juniadi, A. A. N. D., & Markeling, I. K. (2018). Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Menggunakan *Virtual Currency* di Indonesia. *Kertha Semaya*, 4(3), 1–15.
- Kurniawan, A. M. (2020). Pemajakan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Lintas Negara (*Unilateral Measure Vs Global Consensus*). In *Simposium Keuangan Negara* (p.315).
- Maulani, A. F. (2021). Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi Cryptocurrency di Indonesia. *Jurist-Diction*, 4(4), 1333. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i4.28441>
- Patterson, Ben and Galliano, Mickäl, 1998, *The Feasibility Of An International "Tobin Tax"*, *European Parliament L-2929 Luxembourg*.
- Sari, A. Y. (2018). Analisis terhadap penerapan pajak atas transaksi e-commerce. i–104. Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Transaksi Elektronik Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Waluyo. (2016). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat



POTENSI PENERIMAAN PAJAK (*HIGH WEALTH INDIVIDUAL*)

Angela Batara Sapa
Ester Gracella Rubiyanto
Tiara
[\[angelabatara01@gmail.com\]](mailto:angelabatara01@gmail.com)

A. POTENSI PENERIMAAN PAJAK

Pemberitaan apa pun yang membahas mengenai orang kaya berpotensi besar menarik perhatian publik, tak terkecuali topik bahasan mengenai kontribusi mereka terhadap penerimaan negara. Atkinson dan Leigh (2010) menuliskan *“The important role held by top income earners cannot be denied. This is not just because their tax share is very significant to the overall total tax revenue, but also because of the economic power which it conveys”*. Dari kalimat tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa distribusi pendapatan di beberapa negara memiliki konsentrasi yang lebih besar pada populasi kecil yaitu di antara 1-5 persen kepada orang yang berpenghasilan tinggi.

Mengacu pada laporan *The Wealth Report 2022* yang dipublikasikan oleh Knight Frank pada 1 Maret 2022, jumlah orang kaya di Indonesia di asumsikan akan naik sebesar 63% dalam lima tahun ke depan. Kenaikan ini mengakibatkan jumlah orang kaya di Indonesia melonjak menjadi 134.015 orang dari jumlah tahun 2021 sebanyak 82.01. Adapun kategori orang kaya yang dimaksudkan dalam istilah *High Net Worth Individuals* (HNWIs) seperti yang tertulis dalam laporannya adalah seseorang dengan harta kekayaan

DAFTAR PUSTAKA

(Artikel Jurnal)

- (Cingano, Federico). 2014. *Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth*. OECD Social, Employment and Migration Working Papers. No. 163, OECD Publishing Gallantino F, 2015. Menyasar Pajak Orang Kaya. Inside Tax, 30 April, pp. 1-72. (Website)
- Alamanda. 2022. Analisis Pengaruh Investable Assets Terhadap Penghasilan Dalam Rangka Penggalan Potensi Pajak High Wealth Individual Di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak, Indonesia. VOLUME 3 NO 2, Scientax.
- Available at: <https://tirto.id/jumlah-orang-kaya-indonesia-diprediksi-naik-63-persen-dalam-5-tahun-gpPf> [Accessed 17 Agustus 2022].
- Dian Kurniati, 2022. Penerimaan Pajak Tumbuh 53,8% Hingga Mei 2022, Sri Mulyani catat Ini. [Online] Available at: <https://news.ddtc.co.id/penerimaan-pajak-tumbuh-5358-hingga-mei-2022-sri-mulyani-catat-ini-40049> [Accessed 20 August 2022].
- Dolab. 2022. Teknik Analisis Data Pengertian Hingga Contoh Penggunaan. Dolab.<https://www.dqlab.id/teknik-analisis-data-pengertian-hingga-contoh-penggunaan#:~:text=Teknik%20analisis%20data%20merupakan%20suatu,khususnya%20yang%20berkaitan%20dengan%20penelitian.17/Agustus/2022>.
- Jannah, S. M., 2022. Jumlah Orang Kaya Indonesia Diprediksi Naik 63 Persen dalam 5 Tahun. [Online]
- Pusdiklat Pajak. 2014. BAGAIMANA OTORITAS PAJAK MENGELOLA PAJAK ORANG KAYA. Kementerian Keuangan. <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-pajak-bagaimana-otoritas-pajak-mengelola-pajak-orang-kaya-2019-11-05-ece6b3af/.16/Agustus/2022>.
- Redaksi DDTC News. 2021. Optimalkan Penerimaan Wajib Pajak HWI, DJP: Dapat kami deteksi. DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/optimalikan-penerimaan-wajib-pajak-hwi-djp-dapat-kami-deteksi-28259>. 17/Agustus/2022.
- Sifi, Masdi. 2021. Tingkatkan Penerimaan Pajak, Pemerintah Tetapkan Wajib Pajak High Wealth Individual. Inakoran. <https://inakoran.com/tingkatkan-penerimaan-pajak-pemerintah>

petapkan-wajib-pajak-high-wealth-individual/p30967.
16/Agustus/2022.



LITERASI DIGITAL DAN KEWAJIBAN PELAPORAN PAJAK

Muhammad Riko Hamdani

Lia Novitasari

Ovita Berliana

rikohamdani665@gmail.com

A. KEWAJIBAN PELAPORAN PAJAK UMKM

Malang merupakan salah satu kota yang mengalami peningkatan jumlah Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) per tahun dengan jumlah 17.071 usaha di tahun 2020 dari sebelumnya 17.021 di tahun 2019 (Tabel 1). Banyaknya UMKM membuat peran mereka menjadi penting dalam perekonomian Kota Malang. Peran UMKM telah teruji ketika Indonesia menghadapi kondisi pandemic, dimana banyaknya tenaga kerja di PHK beralih untuk membuka usaha. Selain berperan dalam penyerapan tenaga kerja, keberadaan UMKM akan memberikan kontribusi tersendiri dalam penerimaan pajak. Tabel 1. Jumlah Usaha dan Pedagang Kota Malang

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, A. (2018). Kemampuan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menggunakan E-Filing. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 8(2), 174–211. <https://doi.org/10.35448/jequ.v8i2.4448>
- Desmayanti, E. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Fasilitas E-Filing Oleh Wajib Pajak Sebagai Sarana Penyampaian Spt Masa Secara Online Dan Realtime. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 1–12.
- Gilster, P. A. (2007). *Closing Remarks: A Charter for Interstellar Studies*. *AIP Conference Proceedings*, 886, 204–206. AIP. <https://doi.org/10.1063/1.2710056>
- Kemdikbud. (2017). K. Jakarta: Sekretariat TIM GLN Kemdikbud, 8.
- Leaning, M. (2019). *An approach to digital literacy through the integration of media and information literacy*. *Media and Communication*, 7(2), 4–13. <https://doi.org/10.17645/mac.v7i2.1931>
- Lee, S.-H. (2014). *Digital Literacy Education for the Development of Digital Literacy*. *International Journal of Digital Literacy and Digital Competence*, 5(3), 29–43. <https://doi.org/10.4018/ijdlldc.2014070103>
- List, A. (2019). *Defining digital literacy development: An examination of pre-service teachers' beliefs*. *Computers and Education*, 138(May 2018), 146–158. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.03.009>
- Martin, A. (2008). *Digital Literacies: Concepts, Policies & Practices*.
- Nasikin, M. (2016). Praktik Penyusunan Laporan Keuangan Pada UMKM Kuliner di UMKM Ishokuiki Kota Tuban. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.
- Riel, J., & Christian, S. (2016). *Charting Digital Literacy: A Framework for Information Technology and Digital Skills Education in the Community College*. *SSRN Electronic Journal*, (541), 1–22. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2781161>
- Rumat, S. H. W., & Sitinjak, N. D. (2019). Dinamika Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Kupang. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan*, 1(1), 44–54.

- Sevilla. (2007). *Research Methods*. Quezon City: Rex Printing Company.
- Tambunan, T. (2002). Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia, Beberapa Isu Penting. Jakarta: Salemba Empat.
- Warlick, F. (2004). *Redefining Literacy for the 21st Century*. Santa Barbara, CA: Linworth Publishing.



PENGELOLAAN LIMBAH CAIR INDUSTRI UNTUK PELESTARIAN EKOSISTEM LAUT

Mellyana Ulyses Hutabarat

Raissa Arifa Farina

Yohana Herdianly Br. Nainggolan

julysesmellyana123@gmail.com

A. PENGELOLAAN LIMBAH CAIR INDUSTRI

Pajak merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah yang menjadi salah satu sumber terbesar penerimaan negara. Pajak memiliki berbagai fungsi yakni fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi re-distribusi pendapatan. Namun, pada penerapannya pajak condong berfokus hanya sebagai sumber penerimaan negara tanpa memperhatikan fungsi mengatur. Oleh sebab itu, banyak masyarakat yang terus-menerus melakukan aktivitas ekonomi (industri) tanpa memperhatikan dampak terhadap lingkungan, seperti melimpahnya limbah cair akibat aktivitas industri.

Salah satu kebijakan yang perlu dilaksanakan pemerintah untuk mendorong pengendalian limbah cair yakni melalui penerapan *Green Tax* (Pajak Lingkungan). Dalam penerapannya, green tax menjadi kebijakan yang penting karena berperan sebagai pembatas sektor industri dalam menghasilkan limbah yang nantinya dapat berdampak pada keadaan ekosistem laut. Melalui kebijakan *green tax*, pemerintah mampu melakukan tindakan pencegahan, pengelolaan, hingga penyelesaian dari adanya pencemaran yang terjadi. Selain itu, *green tax* tidak hanya efektif untuk

DAFTAR PUSTAKA

- Boom Cárcamo, E. A. and Peñabaena-Niebles, R. (2022) '*Opportunities and challenges for the waste management in emerging and frontier countries through industrial symbiosis*', *Journal of Cleaner Production*, 363 (January). doi:10.1016/j.jclepro.2022.132607.
- Eva Mustika Pratiwi, E. and Setyawan, G. (2014) 'Tinjauan Dalam Rencana Pemberlakuan *Green Tax* Atau *Eco Tax* Di Indonesia Untuk Menghadapi Asean Economic Community 2015', *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(3), p. 443. doi: 10.17509/jrak.v2i3.6596.
- Hasan, D. and Puspitasari, D. E. (2008) 'Tinjauan Terhadap Rencana Penerapan Pajak Lingkungan Sebagai Instrumen Perlindungan Lingkungan Hidup Di Indonesia', *Mimbar Hukum*, 20(3), pp. 411–588.
- Indrawan, N. et al. (2018) '*The biogas development in the Indonesian power generation sector*', *Environmental Development*, (25 September 2017), pp. 85–99. doi: 10.1016/j.envdev.2017.10.003.
- Lago, M. et al. (2015) *Use of economic instruments in water policy: Insights from international experience*, *Use of Economic Instruments in Water Policy: Insights from International Experience*. doi: 10.1007/978-3-319-18287-2.
- de Mooij, R. (1996) '*Environmental taxes and unemployment in Europe*', *Transfer: European Review of Labour and Research*, 2(3), pp. 481–492. doi: 10.1177/102425899600200307.
- Rahmawati, I. P. (2019) 'Konstruksi Pajak Lingkungan di Indonesia', *Jurnal Wacana Hukum*, 25(2), p. 1. doi: 10.33061/1.jwh.2019.25.2.2992.
- Safitra, D. A. and Hanifah, A. (2021) 'Environmental Tax: Principles and Implementation in Indonesia', *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(2), pp. 23–33. doi: 10.31092/jpkn.v2i2.1122.
- Salim, A. et al. (2022) 'Dampak pajak karbon terhadap kelangsungan bisnis 1,2', *Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 03(01).
- Suharto, 2011 (2020) '*Limbah Cair Bab 2*', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., pp. 2013–2015.



KEMAJUAN TEKNOLOGI PADA ERA DIGITAL UNTUK KEPATUHAN PAJAK

Dinda Purwitasari

Shafira Azahra Subekti

Dinda Yusiana Hartati

dinda.purwitasari@uhamka.ac.id

A. KEMAJUAN TEKNOLOGI ERA DIGITAL

Sumber utama penerimaan negara adalah pajak. Dalam APBN, proporsi penerimaan pajak melebihi 70%. Oleh karena itu, sebagai lembaga pemerintah di bidang administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dipercaya untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya di bidang penerimaan pajak. DJP dibiayai oleh APBN untuk menjalankan fungsinya, dengan tujuan untuk memenuhi APBN melalui pemungutan pajak. Pada 2021, penerimaan pajak mencapai Rp 1.277,5 triliun. Jumlah ini sesuai dengan 103,9% dari tujuan penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun (APBN) 2021. Jika dibandingkan dengan pemungutan pajak tahun 2020 sebesar Rp. 1.072,1 triliun atau 83,95%, maka penerimaan pajak tahun ini meningkat 19,2%.

Saat ini, pemerintah sedang berupaya meningkatkan pendapatan negara dengan memberlakukan undang-undang bagi perusahaan dan orang pribadi yang sebelumnya dibebaskan dari pengenaan pajak. Antara lain, pemerintah mengumumkan aturan terbaru pemungutan Pajak Pertambahan Nilai melalui perdagangan melalui sistem elektronik pada Mei 2020, sebagaimana tertuang dalam PMK No.48/PMK.03/2020. Jika kebijakan tersebut diterapkan dengan

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (2005). *Attides, Personallity and Behavior. In International Journal of Strategic Innovative Marketing* (Vol. 3, pp. 117–191).
- Alharbi, S., & Drew, S. (2014). *Using the TAM in Understanding Academics' Behavioural Intention to Use Learning Management Systems.pdf. International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 5(1), 143–155.
- Andika, K. D., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh Technology Acceptance Model terhadap Penggunaan e- Filing (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Singaraja). 10(3), 267–275.
- Arini, D. S., & Isharijadi, I. (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Madiun. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 4(2), 145. <https://doi.org/10.25273/jap.v4i2.683>
- Aryati, T. (2016). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Magister Akuntansi Universitas Trisakti*, 395–404.
- Azwar, Saifudin. 1986. *Validitas dan Reliabilitas*. Jakarta: Rineka Cipta
- Davis, F. (1980). *A TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL FOR EMPIRICALLY TESTING NEW END-USER INFORMATION SYSTEMS: THEORY AND RESULTS. Science*, 146(3652), 1648–1655. <https://doi.org/10.1126/science.146.3652.1648>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Indonesia Tahun 2018. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, 1–118. [https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-05/LAKIN DJP 2018.pdf](https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-05/LAKIN_DJP_2018.pdf)
- DJP Kemenkeu. (2021). Reformasi adalah Keniscayaan, Perubahan adalah Kebutuhan - Cerita di Balik Reformasi Perpajakan.
- Ernita, K., & Sudjiman, P. E. (2021). Pengaruh Penggunaan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis EKONOMIS*, 14(1), 3–18. <https://jurnal.unai.edu/index.php/jeko/article/view/2499>
- Gunawan, A., & Sunardi, H. (2016). Pengaruh Kompensasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt Gesit Nusa Tangguh. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Ukrida*, 16(1), 98066.
- Karmila. (2016). PENGARUH TAM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGGUNAAN E-FILLING SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

- PADA KPP PRATAMA SUKOHARJO. 3(2), 80–91.
<https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/731%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/269%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/106>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2020). Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan.
 File:///C:/Users/HERMAWAN/Downloads/Documents/0158037X.2017.1336995.Pdf, 51–52.
- KEMENTRIAN, K. R. I. (2018). PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.
- Mahyarni. (2013). Sebuah Kajian Historis tentang Perilaku. Jurnal El-Riyasah, 4(1), 13–23. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/elriyasah/article/view/17/13%0Ask25>
- Merliyana, & Saefurahman, A. (2017). Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Studi Kasus: Wajib Pajak Orang Pribadi Di Rawamangun Jakarta Timur. Jurnal Akuntansi Dan Manajemen, 13(01), 134–167.
<https://stei.ac.id/ojsstei/index.php/JAM/article/view/189>
- Monica, K. A., Putri, P., Yasa, I. N. P., & Wahyuni, M. A. (2018). Pengujian Technology Acceptance Model (TAM) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna Samsat Online (Studi Pada Kantor Samsat Kabupaten Buleleng). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha, 9(2), 2614–1930. www.kemenkeu.go.id/
- Muntianah, Tutik S. Astuti, E. S. A. D. F. (2012). Pengaruh Minat Perilaku Terhadap Actual Use Teknologi Informasi dengan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM). Profit Universitas Brawijaya Malang, 6(1), 88–113.
<https://profit.ub.ac.id/index.php/profit/article/view/141>
- Novelina, H. (2017). PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP KANWIL DJP JATIM I DAN JATIM II. Jurnal Keperawatan. Universitas Muhammadiyah Malang, 4(1), 724–732.
<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/en/mdl20203177951%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-02008879%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0884-z%0Ahttps://doi.org/10.1080/13669877.2020.1758193%0Ahttp://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article>

- Pemerathna, A. H. S. (2017). *Economic Impact of Digital Taxation: A Case on Information Communication Technology Industry Sri Lanka*. SSRN Electronic Journal, 325–346. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2910328>
- Perdana Putra, B., Agustin, H., & Angelina Setiawan, M. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. In *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* (Vol. 2, Issue 2). <https://doi.org/10.24036/jea.v2i2.233>
- Putri, M. (2018). Pengaruh *E-filling*, *E-Biling*, dan *E-Tax* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Sari, N., Zulvia, D., Widayati, R., & Septiano, R. (2018). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. *Jurnal Pundi*, 2(2). <https://doi.org/10.31575/jp.v2i2.68>
- Sari, R. (2019). Pengaruh E-filling, E-billing Dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kediri. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 5(1), 158–170.
- Situmeang, M. F., & Pesireron, S. (2021). E-FILLING SYSTEM TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PERAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI PEMODERASI. 94–102.
- Srimulyati, D. (2021). TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI ERA PANDEMI COVID-19 (Studi mengenai Sosialisasi PMK 86 / 2020 dan Literasi Digital Perpajakan pada UMKM di Kabupaten Indramayu) SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Pada Program Studi Akuntansi Oleh: DINI SRIMULYATI. 19.
- Tambun, S., & Witriyanto, E. (2016). Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 1(2), 86–94.
- Wulandari, D. S. (2021). Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.



MOMENTUM PRESIDENSI G20 PADA BIDANG PERPAJAKAN INTERNASIONAL UNTUK MEWUJUDKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)*

**ALICIA TANAYA
LUSIA VICTOLIA
SHARENE OLIVIA**
aliciatanaya16@gmail.com

A. PRESIDENSI G20 PADA BIDANG PERPAJAKAN INTERNASIONAL

Suatu negara tentunya tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya bantuan dari negara lain. Hal inilah yang terus memicu diadakannya kerja sama antar negara, dimulai dari kerja sama regional, bilateral, hingga multilateral. Berbagai pertemuan antar negara kerap kali diadakan untuk membahas kerja sama tersebut, salah satunya adalah Group of Twenty atau yang lebih dikenal dengan istilah G20. Pada 2022 ini, Indonesia mendapatkan kesempatan untuk menjadi tuan rumah atau Presidensi G20. Berbagai isu ekonomi dan keuangan akan turut dibahas dalam Presidensi G20 agar negara yang terlibat dapat saling mendukung dan bahu-membahu untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan (DJKN Kemenkeu, 2022).

Hal ini sejalan dengan upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, melalui kesepakatan baru berupa dua pilar Perpajakan Internasional yang mengacu pada OECD/G20 *Base Erosion and Profit Shifting Project* tentang Addressing

DAFTAR PUSTAKA

- Amara. 2022. Presidensi G20, Indonesia Dukung Pajak Global. <https://www.pajakku.com/read/629dcf50a9ea8709cb18a34b/Presidensi-G20-Indonesia-Dukung-Pajak-Global>. 29 Juli 2022.
- Anita. 2018. Pengertian SDGs (*Sustainable Development Goals*) dan 17 Tujuannya. <https://www.daftarinformasi.com/pengertian-sdgs/>. 27 Juli 2022.
- Arnold, B. J. 2016. *International Tax Primer*. In Kluwer Law International. 28 Juli 11
- Asmarani, Nora Galuh Candra. 2021. Apa Itu Pilar 1 dan Pilar 2 Proposal Pajak OECD. <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-pilar-1-dan-pilar-2-proposal-pajak-oecd-31707>. 6 Agustus 2022.
- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2021. Manfaat Kesepakatan Sistem Perpajakan Internasional yang Baru Bagi Indonesia. https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/siaran-pers/file/1627990261_Siaran%20Pers%20Manfaat%20Kesepakatan%20BEPS%20untuk%20Perpajakan%20Indonesia.pdf. 2 Agustus 2022.
- Brock, G. 2014. *International Taxation*. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511984792.024>. 28 Juli 2022.
- DDTCNews. 2022. Ini Penjelasan Resmi Ditjen Pajak Soal 14 Aturan Baru Turunan UU HPP. <https://news.ddtc.co.id/ini-penjelasan-resmi-ditjen-pajak-soal-14-aturan-baru-turunan-uu-hpp-38219>. 1 Agustus 2022.
- Finaka, Andrean W. 2017. Memburu Wajib Pajak Nakal dengan AEOL. <https://indonesiabaik.id/infografis/memburu-wajib-pajak-nakal-dengan-aeoi-1>. 6 Agustus 2022.
- Hajar, Wienneta Aulia. 2022. BEPS 2.0 dan Aspek Pajak Internasional. <https://konsultanpajak-surabaya.com/beps-20-dan-aspek-pajak-internasional-#:~:text=SURABAYA%20E2%80%93%20BEPS%20>. 6 Agustus 2022.
- Hendartyo, Muhammad. 2021. OJK: Indonesia Diproyeksikan Jadi Negara Ekonomi Digital Nomor1 di ASEAN. <https://bisnis.tempo.co/read/1527546/ojk-indonesia-diproyeksikan-jadi-negara-ekonomi-digital-nomor-1-di-asean>. 1 Agustus 2022.
- Indah, Retno Nur. 2022. Apa itu G20 dan Manfaatnya untuk Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-singawang/baca->

- [artikel/14747/Apa-itu-G20-dan-M](#) anfaatnya-untuk-Indonesia.html. 28 Juli 2022.
- Kementerian PPN/Bappenas. 2021. *Sustainable Development Goals* (SDGs). <https://www.sdg2030indonesia.org/>. 4 Agustus 2022.
- Ningrum, Restia. 2021. Perusahaan Multinasional: Pengertian dan Contohnya. <https://kerjoo.com/blog/perusahaan-multinasional/>. 3 Agustus 2022.
- Prakasita, Utari. 2019. Dampak Jalan Trans Papua terhadap Masyarakat Papua. <https://www.kompasiana.com/utariprakasita0708/5cf0a00ffc75a161080dba94/dampak-jalan-trans-papua-terhadap-masyarakat-papua?page=all>. 17 Agustus 2022.
- Rafinska, Kezia. 2019. Pajak Internasional dan Penerapannya di Indonesia. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pajak-internasional>. 5 Agustus 2022.
- Ramli, Rully. 2018. Jalan Trans Papua Dibangun, Harga Barang Sudah Mulai Turun. <https://www.inews.id/finance/makro/jalan-trans-papua-dibangun-harga-barang-sudah-mulai-turun>. 17 Agustus 2022.
- Respati, Agustinus Rangga. 2022. Bagaimana Sejarah Terbentuknya G20? . <https://money.kompas.com/read/2022/04/27/160000526/bagaimana-sejarah-terbentuknya-forum-g20?page=2>. 26 Juli 2022.
- Setyawan, Herry. 2022. Inclusive Framework Pilar Satu dan Pilar Dua #3. <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/inclusive-framework-pilar-satu-dan-pilar-dua>. 6 Agustus 2022.
- Rohatgi, Roy. 2005. *Basic International Taxation, Volume 1*. Edisi 2, Richmond Law & Tax. 28 Juli 2022.
- Setyawan, Herry. 2022. Issue Perpajakan Internasional Dalam Presidensi G20 Tahun <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/issue-perpajakan-internasional-dalam-presidensi-g20-tahun-2022>. 28 Juli 2022.
- Sihaloho, Markus Junianto. 2021. Presidensi di G20, Indonesia akan Terus Dorong Pencapaian Tujuan SDGs. <https://investor.id/nasional/271920/presidensi-di-g20-indonesia-akan-terus-dorong-pencapaian-tujuan-sdgs>. 29 Juli 2022.
- Siswanto, Dendi. 2022. Bersiap Menadah Potensi Pajak dari Perusahaan Multinasional. <https://nasional.kontan.co.id/news/bersiap-menadah-potensi-pajak-dari-perusahaan-multinasional>. 26 Juli 2022.
- Tim Kontan. 2022. Manfaat Besar Bagi Indonesia dari Aturan Pajak Perusahaan Multinasional. <https://nasional.kontan.co.id/news/manfaat-besar-bagi-indonesia-dari-aturan-pajak-perusahaan-multinasional>. 1 Agustus 2022.

Wildan, Muhamad. 2022. Ketentuan Pilar 2 OECD Ganggu Efektivitas Insentif Pajak? Ini Kata DJP. <https://news.ddtc.co.id/ketentuan-pilar-2-oecd-ganggu-efektivitas-insentif-pajak-ini-kata-djp-3716>. 1 Agustus 2022.



BIG DATA ANALYTICS DALAM ADMINISTRASI PERPAJAKAN

Rivmilhyan Junior Hakim
Lelyana Sanda Padang
Chelsea Indri Kurnia
rivmilhyan.h@gmail.com]

A. *BIG DATA ANALYTICS ADMINISTRASI PERPAJAKAN*

Melalui teknologi in formasi, triliunan byte data diciptakan setiap hari dari berbagai sumber, seperti dari media sosial, sensor, video surveillance, dan smart grids. Lautan data ini mengarah pada satu terminologi Big Data. Data memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan strategis. Oleh karenanya, pihak yang mampu mengolah dan memanfaatkan data- data yang tersedia dalam volume besar, keragaman variatif, kompleksitas tinggi dan kecepatan penambahan data yang tinggi, dapat mengambil keuntungan yang besar. Namun sayangnya, penerapan *Big Data* analitik masih belum begitu populer di Indonesia. Sejauh ini tiga bidang usaha pengguna utama Big Data di Indonesia yaitu perusahaan telekomunikasi, perbankan, dan produsen barang-barang konsumsi ringan dan murah seperti minuman dan makanan kemasan (*consumer goods*).

Para praktisi yang melakukan studi tentang big data analytics menekankan perlunya memahami bagaimana, mengapa dan kapan aplikasi big data analytics (BDA) dapat menjadi sumber yang sangat berharga bagi perusahaan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif (Abbasi, Sarker, & Chiang, 2016; Agarwal & Dhar, 2014; dan Corte Real, Oliveira & Ruivo, 2014).

DAFTAR PUSTAKA

- Abbasi, A., Sarker, S., Chiang, R.H.L., 2016. *Big data research in information systems: toward an inclusive research agenda*. J. Assoc. Inf. Syst. 17, 1–32
- Agustini, K. (2017, September). Inovasi Teknologi dalam Pendidikan melalui *Big Data Analytic dan Personalized Learning*. In Seminar Nasional Pendidikan Teknik Informatika (SENAPATI) (No. 7).
- Ashari, Mochamad, 2015. *Big Data Industry and Academic Point of View*. Konferensi Big Data Indonesia.
- ICAEW 2016, “*Data Analytics for External Auditors*,” *International Accounting, Auditing & Ethics* (IAAE).
- IOTA 2016, “*Applying Data and Analytics in Tax Administration*,” *Intra-European Organisation of Tax Administrations* (IOTA).
- Kusumasari, Dita, Rafizan, Onni. (2017). Studi Implementasi Sistem Big Data Untuk Mendukung Kebijakan Komunikasi Dan Informatika. Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi. ISSN 2621-1386 Volume:8 No. 2.
- Microsoft dan PwC 2017 “*Digital Transformation of Tax Administration*,” *Microsoft and Price Waterhouse Coopers Belastingadviseurs N.V.*, Netherland.
- OECD 2016, “*Advanced Analytics for Better Tax Administration Putting Data to Work*,” OECD, Paris.
- Sirait, Emyana Ruth Eritha, 2016, “Implementasi Teknologi *Big Data* di Lembaga Pemerintahan Indonesia”, Jurnal Penelitian Pos dan Informatika, Vol. 6. Vience Mutiara Rumata, “Peluang dan Tantangan *Big Data* dalam Penelitian Ilmu Sosial: sebuah Kajian Literatur”, Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik, Vol 20, No 1. Agustus 2016



Potensi dan Tantangan Perpajakan Sebagai Kunci Mewujudkan **Sustainable Development Goals** **(SDGs)**

Penunjukkan Indonesia sebagai pemegang Presidensi G20 atau forum kerja sama multilateral 19 negara utama dan Uni Eropa ini menandakan torehan sejarah baru. Korelasi antara sektor perpajakan yang akan mewujudkan SDGs memegang peranan penting. SDGs akan menjadi topik dalam bahasan di presidensi G20 nantinya. Eksistensi perpajakan sebagai alat yang efektif untuk membantu membiayai tercapainya *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Tantangan yang terjadi nantinya perlu dibahas secara mendalam mengenai praktik *profit shifting*, *illicit financial flows*, peraturan perpajakan internasional, masalah climate control dan eksternalitas negatif. Kemudian kesetaraan *gender* terhadap pemaksimalan UMKM yang dikelola oleh wanita dan dalam konteks mekanisme perpajakan bagi Wajib Pajak wanita perlu disetarakan. Di sisi lain, lingkungan menjadi objek fokusnya dari solusi untuk membangun investasi yang berkelanjutan melalui *green energy*, *green industry*, dan *blue economy*.

Indonesia memiliki tantangan tersendiri untuk mencapai SDGs yang berkelanjutan dari sisi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan. Untuk mendukungnya, dana yang diperlukan membutuhkan stabilitas penerimaan negara melalui sistem perpajakan yang baik. Reformasi perpajakan secara komprehensif, sehingga dapat meningkatkan grade Ease of Doing Business (EoDB) dan iklim bisnis yang baik untuk menarik investor asing. Upaya presidensi G20 Indonesia dalam mendorong pemulihan ekonomi global yang berkelanjutan menuju net zero emission dibahas pada saat pertemuan berlangsung. G20 telah mendorong komitmen negara-negara pada isu perubahan iklim, termasuk untuk *phasing out* subsidi atas fossil fuels dan membentuk *Sustainable Finance Working Group* (SFWG). Hal tersebut sebagai bagian dari indikator SDGs yang akan dibahas secara terstruktur nantinya